



**UCLG**  
Committee

Social Inclusion  
Participatory Democracy  
and Human Rights

## Kampanye Global



### *Membangun universalitas melalui keragaman lokal*

Kampanye Global ini bertujuan untuk mengumpulkan 1000 Pemerintah Daerah dan Regional dari seluruh dunia pada tahun 2030 untuk memperkuat gerakan global Kota dan Wilayah Hak Asasi Manusia. Kampanye ini diluncurkan oleh **Kepresidenan Komite Inklusi Sosial, Demokrasi Partisipatif dan Hak Asasi Manusia** dari **UCLG** (United Cities and Local Governments) dan dengan dukungan dari anggota aktif jaringan lainnya.

#### Apa yang dimaksud dengan Kota atau Wilayah Hak Asasi Manusia?

*"Kota HAM adalah sebuah komunitas lokal dan proses sosial-politik dalam konteks lokal di mana hak asasi manusia memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai dasar dan pedoman."*

[Deklarasi Gwangju tentang Kota HAM](#) Forum  
Kota HAM Sedunia, 2011

Di tingkat internasional, ratifikasi Hak Asasi Manusia telah menjadi pencapaian penting selama satu abad terakhir demi mewujudkan perdamaian dunia dan kemajuan sosial untuk umum. Sejak saat itu, dunia kita menjadi semakin mengglobal dan terurbanisasi, yang menjadikan **pemerintah lokal dan regional sebagai kawasan yang sangat penting bagi pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia**.

Implementasi hukum hak asasi manusia internasional merupakan tanggung jawab pemerintah lokal dan regional serta kesempatan untuk bertindak atas nama penduduk setempat, untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi mereka serta memastikan terjaminnya harkat dan martabat bagi semua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemerintah lokal dan regional di seluruh dunia telah mengambil inisiatif untuk **memastikan terwujudnya hak asasi manusia yang dapat diakses oleh seluruh warga** melalui tindakan lokal untuk melawan diskriminasi dan ketidaksetaraan, dengan memastikan akses terhadap layanan dasar seperti perumahan, akses terhadap air, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan pendidikan.

Dari daerah pedesaan hingga kota metropolitan, **setiap kota dan wilayah sangat penting dan secara aktif berkontribusi terhadap perlindungan hak asasi manusia; pemajuan; dan kemajuan secara global.**

Menjadi Kota atau Wilayah HAM merupakan **komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup** semua penduduk, dan juga untuk **mendefinisikan modalitas baru dalam aksi publik**, meningkatkan peran pemerintah lokal dan wilayah untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, tangguh, dan damai, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok rentan (anak-anak, perempuan, orang tua, etnis minoritas, penyandang disabilitas, dll.)

Melalui pengadopsian piagam hak asasi manusia tingkat lokal; pembentukan ombudsman; komisioner hak asasi manusia; pembentukan kantor untuk non-diskriminasi atau promosi hak asasi manusia di bidang budaya, pemerintah lokal dan wilayah telah memelopori perspektif baru tentang visi "Kota Hak Asasi Manusia", **mengingat pentingnya layanan publik** untuk tidak meninggalkan siapa pun dan di mana pun.

Dengan memanfaatkan hak asasi manusia sebagai **vektor transformasi dan pemberdayaan** untuk mengubah kontrak sosio-teritorial dengan masyarakat lokal, Kota dan Wilayah HAM juga mengakui **pentingnya pilar demokrasi** dan perlunya mendorong partisipasi penduduk; serta kolaborasi dengan masyarakat sipil dan organisasinya.

Relevansi fitur sosial dan demokrasi ini semakin diperkuat melalui "*Hak atas Kota*", sebuah konsep yang disebutkan dalam Agenda Perkotaan Baru UN-Habitat dan diadopsi oleh Kongres UCLG di Bogota pada tahun 2016, **yang telah membawa dimensi teritorial baru pada hak asasi manusia**. Dengan mengartikulasikan hak-hak individu, hak-hak kolektif dan kepentingan umum, "*Hak atas Kota adalah hak semua penduduk, saat ini dan di masa depan, permanen maupun sementara, untuk menghuni, menggunakan, menempati, memproduksi, mengatur, dan menikmati kota, desa, dan permukiman yang adil, inklusif, aman, dan berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai hal yang esensial bagi kehidupan yang penuh dan layak.*" (Platform Global untuk Hak atas Kota).

## Capaian penting dari gerakan global Kota HAM

Before	Pengadopsian beberapa <b>Piagam dan Deklarasi lokal</b> (Barcelona, Gwangju, Mexico City, Montreal, New York, Rosario, Saint-Denis, San Francisco, Wina)
2012	Pengadopsian <b>Piagam Global UCLG-Agenda Hak Asasi Manusia di Kota</b>
2013	<b>Resolusi pertama Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa</b> tentang "Peran pemerintah daerah dalam pemajuan dan perlindungan
2014	<b>Pedoman Kota Hak Asasi Manusia Gwangju</b> di Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (WHRCF)
2016	<b>Pengakuan "Hak atas Kota"</b> oleh UCLG dan dalam <b>Agenda Perkotaan Baru UN Habitat</b>
2018	Perayaan ulang tahun ke-20 Piagam Hak Asasi Manusia Eropa di Kota, ulang tahun ke-25 Deklarasi Wina, dan 70 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2019	<b>Pertemuan pertama di Jenewa antara Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan 15 perwakilan pemerintah daerah</b>
2020	<b>Dialog Tingkat Tinggi Pertama antara UCLG dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR)</b> selama Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia di Gwangju
2021	Penandatanganan <b>perjanjian kerja sama antara UCLG dan OHCHR</b> dalam rangka Dewan Dunia UCLG
2022	<b>Peluncuran kampanye global "10, 100, 1000 Kota dan Wilayah Hak Asasi Manusia pada tahun 2030"</b> dan <b>pembaruan Piagam UCLG-Agenda Hak Asasi Manusia di Kota</b> oleh UCLG-CSIPDHR dan Copresidency-nya

## Mengapa meluncurkan Kampanye Global Kota dan Wilayah Hak Asasi Manusia?

Tujuan 1	Menghubungkan <b>inisiatif lokal di tingkat internasional</b> untuk mempromosikan solidaritas, kerja sama, dan dialog antara kota/wilayah hak asasi manusia dari berbagai wilayah di dunia
Tujuan 2	<b>Memperkuat dan memperluas gerakan global Kota dan Wilayah Hak Asasi Manusia</b>
Tujuan 3	<b>Meningkatkan aksi lokal tentang hak asasi manusia</b> untuk mendorong pengakuan dan partisipasi pemerintah daerah dan wilayah dalam agenda dan mekanisme global hak asasi manusia, termasuk di tingkat PBB
Tujuan 4	<b>Mendorong pemerintah lokal dan regional untuk memulai proses adopsi dan pengakuan kerangka kerja hak asasi manusia lokal untuk memandu tindakan mereka</b>

Kampanye ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan perjanjian kerja sama bersejarah antara UCLG dan Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) pada tahun 2021.

Langkah pertama dari Kampanye ini adalah mengumpulkan 100 kota dan wilayah yang sedang berupaya atau ingin bertindak untuk hak asasi manusia pada kesempatan [Kongres UCLG di Daejeon](#) dan selama [Forum Kota Hak Asasi Manusia Sedunia di Gwangju \(10 - 14 Oktober 2022, Republik Korea\)](#) satu tahun setelah penandatanganan perjanjian dengan OHCHR.

Kampanye ini juga terkait dengan dua proses besar lainnya yang diprakarsai oleh Komite Inklusi Sosial, Demokrasi Partisipatif dan Hak Asasi Manusia (Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights - CSIPDHR): 1) **pembaruan Piagam Agenda Global UCLG untuk Hak Asasi Manusia di Kota yang diadopsi pada tahun 2012**; dan 2) **peluncuran perangkat pembelajaran online terbuka (MOOC) tentang "Pemerintah Daerah dan Hak Asasi Manusia"** untuk melatih para pegawai pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses-proses tersebut, hubungi sekretariat Komite Inklusi Sosial, Demokrasi Partisipatif dan Hak Asasi Manusia UCLG: [cisdps@uclg.org](mailto:cisdps@uclg.org)

## Mengapa mengintegrasikan Hak Asasi Manusia ke dalam aksi lokal?

---

**Hak asasi manusia merupakan tantangan sekaligus pendorong untuk mencapai dunia yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis ekonomi, sosial, politik, dan ekologi yang sistemik.** Di tingkat internasional, hak asasi manusia berada di pusat Agenda Baru Perkotaan, Agenda 2030 PBB - yang berupaya "[mewujudkan hak asasi manusia bagi semua](#)" - dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

**Pemerintah local dan wilayah yang telah mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam aksi lokal mereka telah mampu merespons krisis COVID-19 dengan lebih efektif,** misalnya dengan memastikan perlindungan perempuan korban kekerasan; menyediakan akses vaksinasi bagi para migran; akses pendidikan; serta menumbuhkan solidaritas dan kepedulian terhadap orang-orang yang paling rentan.

**Hak asasi manusia juga menjadi sumber inspirasi bagi inklusi dan inovasi sosial, menciptakan area aksi baru untuk menanggapi tuntutan dan realitas lokal,** mulai dari dialog antar budaya, perdamaian, dan perlindungan penduduk dari penindasan negara, aksi iklim, kemandirian sumber daya energi, atau hak-hak digital. **Hak asasi manusia telah menjadi nilai tambah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menegaskan diri mereka sebagai aktor politik, sebagai pemerintah daerah yang menangani tuntutan dan aspirasi yang menyertai penduduknya.**

**Hak asasi manusia memberikan kerangka kerja untuk mengakui inisiatif dan praktik pemerintah daerah yang inovatif.** Menghubungkan praktik-praktik inovatif dengan nilai-nilai dan hukum hak asasi manusia internasional mendorong legitimasi, normalisasi, dan pelembagaannya. Pelembagaan memfasilitasi penyebaran praktik-praktik ini dalam konteks lain dan pada skala pemerintahan yang berbeda; sambil membuka jalan untuk refleksi tentang keberlanjutan tindakan lokal, dan **jenis warisan yang ingin dipersiapkan oleh pemerintah lokal dan regional untuk penduduknya di masa depan.**

## Bagaimana cara bergabung dalam kampanye ini?

---

Pemerintah daerah atau wilayah yang ingin bergabung dalam kampanye ini diundang untuk mengisi formulir terlampir dan mengirimkannya ke Sekretariat UCLG-CSIPDHR di: [cisdpr1@uclg.org](mailto:cisdpr1@uclg.org).

Kampanye ini terbuka untuk pemerintah lokal dan wilayah di seluruh dunia dari semua ukuran, dari semua jenis yurisdiksi dan dengan pengalaman sebelumnya atau bersedia untuk berkomitmen terhadap HAM.



**UCLG**  
Committee

Social Inclusion  
Participatory Democracy  
and Human Rights